

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### I. Buku

A.A Navis. 1986. *Alam Takambang jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers: Jakarta

A.G. Ginting, dkk. 2012. *Perlindungan Masyarakat Adat dan REDD: Sebuah Panduan Praktis*. Forest People Programme (FPP): Jakarta

Agung Wibowo, dkk. 2013. *Outlook Konflik Sumber Daya Alam dan Agraria*. HuMa: Jakarta

Ahmad Zazali dan Jomi Suhendri. 2012. *Panduan FPIC: Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan dalam Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam*. Forest People Programme (FPP): Pekanbaru

Alan Bouton. 2007. *Sebuah Panduan Proyek Untuk Mendorong Kebijakan ILO Mengenai Masyarakat Hukum Adat*. Forest People Programme (FPP): Stratford Road

AMAN, World Agroforestry Centre (ICRAF), Forest People Programme (FPP). 2003. *Satu Yang Kami Tuntut: Pengakuan*. Bogor

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP). 2014. *Panduan Praktis Bagi PraktisiMedia Mengenai Isu-Isu Seputar Masyarakat Adat di Asia*. Chiang Mai, Thailand

Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Bernadius Steny. 2005. *Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam Pergulatan Hukum Lokal*. HuMa. Jakarta.

Bernhard Limbong. 2015. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Pustaka Margaretha. Jakarta

\_\_\_\_\_, 2015, *Politik Pertanahan*. Pustaka Margaretha. Jakarta

Boedi Harsono. 1970. *Undang- Undang Pokok Agraria: Sedjarah Penjusunan Isi dan Pelaksanaan Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan. Jakarta.

Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta

C.F Strong. *Konstitusi- Konstitusi Politik Modern*. Nusa Media: Bandung

Colchester, Marcus dan Maurizio Farhan Ferarri, 2007. *Menjadikan FPIC Berjalan: Tantangan dan Peluang Bagi Masyarakat Adat*. Forest Peoples Programme (FPP): Moreton in Marsh

Elza Syarif. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Kompas Gramedia: Jakarta

Feri Amsari. 2011. *Perubahan UUD 1945*. Raja Grafindo Persada: Jakarta

G. Kertasapoetra, dkk. 1985. *Hukum Tanah: Jaminan Undang Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Bina Aksara. Jakarta

Hedar Laudjeng. 2003. *Mempertimbangkan Peradilan Adat*. HuMa. Jakarta

Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Kompas: Jakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kurnia Warman. 2007. *Nasib Tenurial Adat Atas Kawasan Hutan: Tumpang Tindih Klaim Adat dan Negara Pada Aras Lokal di Sumatera Barat*. HuMa. Jakarta

Marcus Colhester. 2006. *Panduan Bagi Para Aktifvis: Free, Prior, Informed, Consent (FPIC)*. Forest Peoples Programme (FPP): Stratford Road

Martua Sirait. 2000. *Bagaimana Hak Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Suber Daya Alam Diatur*. ICRAF. Bogor

Myrna A. Safitri. 2011. *Untuk Apa Pluralisme Hukum: Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia*. HuMa. Jakarta.

Patrick Anderson. 2011. *FPIC dalm REDD+ Prinsip dan Pendekatan Untuk Pengembangan Kebijakan dan Proyek*. RECOFTC dan GIZ .Bangkok

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta.

Sjachran Basah. 1981. *Hukum Tata Negara Perbandingan*. Alumni: Bandung

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Soroyo Wignyodipuro. 1983. *Pengantar dan Azaz Azaz Hukum Adat*. PT. Gunung Agung. Jakarta

Upik Djailanis dan Noer Fauzi Rachman. 2014. *Dalam Cornelis Van Vollenhoven: Orang Indonesia dan Tanahnya*. STPN Press: Yogyakarta.

Yance Arizona. 2014. *Konstitusionalisme Agraria*. STPN Press: Yogyakarta

## **II. Peraturan Perundang- Undangan dan Konvensi Internasional**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Covenant an Economic, social and Culture Right ( Konvenan Internasional tentang Hak hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)



Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi  
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata  
Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Yang Berada  
Dalam Kawasan Tertentu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman  
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah  
Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang  
Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman  
Modal

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang  
Pemerintahan Nagari

United Nations Declaration on The Right of Indigenous People ( Deklarasi  
Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Masyarakat Adat)



International Labour Organisation Covenant No. 169 Concerning Indigenous and Tribal People in Independent Countries ( Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 169 Tahun 1989 Tentang Masyarakat Adat)

### **III. Tesis, Dokumen, Risalah Pengadilan dan Makalah**

Bachtiar Abna,1983. Tesis. *Pengembalian Konsepsi Objek Hak Ulayat Untuk*

*Menanggulangi Masalah Lingkungan Hidup*

Damiana Tekege. 2001. Tesis. *Praktek Pembebasan Hak Ulayat atas Tanah di*

*Provinsi Tingkat I Papua*

PT.PLN. 1990. Dokumen. *Studi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) PLTA*

*Singkarak Tahun*

Priyono dan Taufik. 1994. Dokumen. *Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL)*

*Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak*

Priyono dan Taufik. 1994. Dokumen. *Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)*

*Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak*

Badan Pembangunan Nasional. 1987. *Pembangunan di Sektor Pertambangan*

*dan Energi*

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Guguk Malalo

Tahun 2010 - 2015

Kurnia Warman. 2015. Risalah Keterangan Ahli Pemohon persidangan Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, Agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon

Bachtiar Abna. 2006. Makalah. *Tanah Ulayat dan Pengentasan Kemiskinan.*

J. Matuankotta, dkk, 2013. *Hak Menguasai Negara atas Tanah dan Prinsip Keadilan Bangsa Indonesia.*

Sayuti Dt.Rajo Panghulu. 2014. Makalah. *Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Panduan Penyelesaian Konflik Kehutanan.*

#### **IV. Internet**

<http://ekuatorial.com/forests/penerapan-fpic-dalam-pengelolaan-sumberdaya-alam>

diakses pada tanggal 24 agustus 2015 jam 20.45

[http://procurement-notices.undp.org/view\\_file.cfm?doc\\_id=39284](http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284), diakses pada tanggal

28 April 2016 pukul 22.42

